



RenJa

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(D P M P T S P)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Rencana kerja tahun 2025 ini disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, dimana rencana kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan selama tahun 2025, juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 yang memberikan gambaran tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Harapan kami Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam menjalankan tanggungjawab/ penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya



Maria Agustina, SE, M.Si
NIP. 19710816 199603 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	46
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat	
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2025	
BAB V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 dengan merujuk kepada Rencana Strategis DPMPTSP 2025–2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat LN.2022/No.69, TLN No.6780 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang LN.2021/No.31, TLN No.6633 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
26. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
27. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
39. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
43. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;

44. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 nomor 10);
45. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 nomor 11);
46. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja DPMPTSP adalah untuk memberikan arah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengendalian sinergitas program dan kegiatan di daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2025 adalah sebagai :

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2025;
2. Pedoman bagi DPMPTSP untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
3. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka memantapkan rencana kerja tahun 2025 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan realisasi Hasil kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2023 secara garis besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai sudah baik, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I. Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah											
	Program administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	-	200,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lama pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lama pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional selama 1 tahun	Unit	-	20,00	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Lembar Materi & Buku Cek	-	2350 dan 14	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lama pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Lama pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lama Pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Orang	-	1.250,00	-	-	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	OH	-	66,00	-	-	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	OH	-	73,00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya tenaga honorarium/ kontrak	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP administrasi pemerintahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	-	200,00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit	-	11,00	-	-	-	-	-	-

	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	-	22,00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Buah	-	4,00	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	Tahun	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan halaman atau taman kantor	Jumlah pemeliharaan halaman atau taman kantor	Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin aparatur	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan BIMTEK	Orang	-	10,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi jabatan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan analisis jabatan SKPD	Jumlah analisis jabatan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu	Jumlah peningkatan kinerja terpadu satu pintu	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen pelaporan SKPD yang diselesaikan	Persen	-	200,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	Dokumen	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah dokumen laporan semester yang disusun	Dokumen	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Dokumen	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang disusun	Dokumen	-	8,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun	Dokumen	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase SKPD yang Telah Melakukan Arsip Baku	Persen	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Lama kegiatan pengarsipan	Tahun	-	1,00	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Persen	-	300,00	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan BIMTEK keuangan dan aset	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan aset pada SKPD	Jumlah laporan aset SKPD	Dokumen	-	4,00	-	-	-	-	-	-
	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pemeliharaan sistem informasi terhadap layanan publik berbasis WEB	Jumlah Pemeliharaan sistem informasi eletronik yang dilaksanakan	Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	-	200,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD	Dokumen	-	2,00	-	-	-	-	-	-
	Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah daerah	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase	-	200,00	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri (In House Training) yang diadakan	Kali	-	8,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen dan hasil survey kepuasan masyarakat	Dokumen	-	4,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Database E-Formasi	Jumlah dokumen Database E-Formasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Jumlah dokumen SKJ	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan pelayanan akta perizinan	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengkajian dan pengembangan perizinan dan nonperizinan	Jumlah dokumen peraturan dan koordinasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

	Penanganan pengaduan kinerja (PTSP)	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan	Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan tenaga kerja	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan pariwisata	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan cipta karya, tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Selesai	Perizinan dan Non Perizinan	-	2.585,00	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perizinan	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan	Jumlah	-	4,00	-	-	-	-	-	-

	Pengkajian dan pengembangan perizinan dan nonperizinan	Jumlah dokumen peraturan dan koordinasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan	Jumlah	-	5,00	-	-	-	-	-	-
	Penanganan pengaduan kinerja (PTSP)	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan	Jumlah	-	12,00	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan tenaga kerja	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persentase	-	92,00	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan pariwisata	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persentase	-	90,00	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persentase	-	86,00	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan cipta karya, tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang di selesaikan	Persentase	-	89,00	-	-	-	-	-	-
	Sistem informasi layanan publik berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi elektronik yang di laksanakan	Aplikasi	-	3,00	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis elektronik	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik berbasis elektronik	Dokumen	-	2,00	-	-	-	-	-	-

	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah promosi potensi investasi penanaman modal yang diikuti	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi penanaman modal, KP3MR dan KP3MN yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan, Jumlah dokumen LKPM dan Jumlah realisasi investasi daerah	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	Milyar	-	12.586,38	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan SPIPISE dan Informasi potensi daerah	Jumlah pelayanan perizinan melalui SPIPISE yang dilaksanakan	Izin dan LKPM	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi kerjasama bidang Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan KKR	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan profil investasi	Jumlah dokumen profil investasi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah Dokumen cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program pengelolaan dan peningkatan investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Milyar	-	12.586,38	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dilaksanakan	Kali	-	9,00	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan,	Jumlah dokumen LKPM realisasi investasi daerah	Per								

					Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		usa haa n	-	100,00	-	-	-	-	-	-
					Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran atau expo yang diikuti	Kali	-	6,00	-	-	-	-	-	-
					Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal	Dok ume n	-	1,00	-	-	-	-	-	-
II. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur															
2	1	0			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan, Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang urusan pemerintah daerah	Pers en	-	200	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Perencanaan Kinerja, Keuangan dan Evaluasi Kinerja	Pers en	-	200	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, Rencana kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dok ume n	-	10	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dok ume n	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dok ume n	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dok ume n	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	Dok ume n	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPMPSP yang Disusun	Dok ume n	-	10	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	8	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaporan Keuangan SKPD	Persen	-	200	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	-	24	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPSTP Tahun	Laporan	-	2	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Laporan	-	2	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	-	200	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Set	-	50	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai SKPD yang di Monitoring, Evaluasi dan Dinilai (Reward ASN / SKP)	Orang	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri(In House Training) yang Diadakan	Kali	-	4	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Barang dan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang Dikelola Dengan Baik	Persen	-	200	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	-	24	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Item	-	15	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Unit	-	9	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	-	7	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	-	57	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dihadiri	OH	-	173	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas Pelayanan Administrasi yang Dilakukan Dengan Baik	Unit	-	5	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Unit	-	20	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Aplikasi	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Dengan Baik	Persen	-	200	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	12	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan / Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	-	24	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	-	24	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase	-	187	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	unit	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	-	21	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	-	131	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	16	-	-	-	-	-	-
2	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan	Persen	-	87	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Rupiah	-	14.725.486.868.646	-	-	-	-	-	-

						Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN	Pers en	-	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Investor Berskala Nasional	Per usa haa n	-	361	-	-	-	-	-	-
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pers en	-	34	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dok ume n	-	5	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dok ume n	-	9	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dok ume n	-	50	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dok ume n	-	3	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dok ume n	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dok ume n	-	2	-	-	-	-	-	-
2	1	0				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Inve stor	-	4	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Kali Dgn Stra tegi	-	4	-	-	-	-	-	-

					Kabupaten/Kota											
2	1	0	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Strategi	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran/ Promosi Digital yang di Ikuti	Kali	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	-	167	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non perizinan dibidang Penanaman Modal	Perizinan dan Non Perizinan	-	19.311	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang di proses	Layanan	-	16.029	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Pemenuhan Komitmen proyek	-	400	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Laporan	-	2.103	-	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kali	-	23	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	Rupiah	-	14.725.486.868.646	-	-	-	-	-	-	-
						Tambahan Realisasi Investasi (Tahunan)	Rupiah	-	1.121.595.431.926	-	-	-	-	-	-	-
						Rasio Penyerapan Tenaga Kerja (Tahunan)	Orang/Perusahaan/Tahun	-	116	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Investor	Perusahaan	-	673	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perproyek yang dipantau dan dibina	Perusahaan	-	90	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen LKPM (Per Triwulan dan Persemester) (Jumlah Proyek dan profil pelaku usaha hasil pemantauan)	Dokumen	-	4	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi/Bimtek, Laporan Kegiatan dan jumlah peserta	Kali	-	14	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Proyek dan Profil Pelaku Usaha Hasil Pengawasan	Proyek	-	67	-	-	-	-	-	-	-

2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Data Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Digital/Elektronik, Buku/Manual)	Buku	-	4	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Pelayanan Informasi/Konsultasi/Pendampingan (Rekon data izin, Rata2 lama penyelesaian Izin, dan Monev izin per semester)	Laporan	-	3	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Pelayanan Informasi/Konsultasi/Pendampingan	Laporan	-	2	-	-	-	-	-	-
III. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.															
					Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	-	-	100	100	100,00	100	100	100
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Pengaangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	-	-	100	100	100,00	100	100	100
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	5	6	120,00	5	5	100
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1	-	-	1	1	100
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1	-	-	1	1	100

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1	-	-	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1	-	-	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	6	6	100,00	6	6	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	4	4	100,00	4	4	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	-	-	100	100	100,00	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	24	24	100,00	24	24	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						12	12	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	1	1	100,00	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	1	1	100,00	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	-	-	100	100	100,00	100	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	1	-	-	2	2	100

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	1	1	100,00	1	1	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	204	153	75,00	204	204	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	51	51	100,00	51	51	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	-	-	100	100	100,00	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	3	3	100,00	3	3	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	2	-	-	2	2	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	49	50	102,04	49	49	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	8	13	162,50	8	8	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	5	3	60,00	5	5	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	120	99	82,50	120	120	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	1	1	100,00	1	1	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	-	-	106	55	51,89	106	106	100

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	2	-	-	2	2	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	57	28	49,12	57	57	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	40	27	67,50	40	40	100
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	2	-	-	2	2	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	5	-	-	5	5	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	36	24	66,67	36	36	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	12	-	-	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	12	12	100,00	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	12	12	100,00	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	-	-	101	45	44,55	103	103	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	1	1	100,00	1	1	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	10	11	110,00	12	12	100

	Operasional atau Lapangan										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	68	22	32,35	68	68	100
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	1	-	-	1	1	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	-	-	1	1	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	20	11	55,00	20	20	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN	Persentase Penyelesaian Perizinan Dan Non Perizinan	Persen	-	-	85	96,02	112,96	87	87	100
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Rupiah	-	-	16.204.808.228.295,70	16.054.131.303.893	99,07	17.355.990.095.316	17.355.990.095.316	100
		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN	Persen	-	-	15	13,53	90,20	15	15	100
		Jumlah Investor Berskala Nasional	Perusahaan	-	-	373	456	122,25	423	423	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penanaman Modal (Investor PMDN dan PMA)	Persen	-	-	15,48	12,68	81,91	13,4	13,4	100
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Dokumen penetapan pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Dokumen	-	-	4	2	50,00	4	4	100

	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	3	1	33,33	3	3	100
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	-	-	70	90	128,57	70	70	100
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peta Potensi Investasi	Dokumen	-	-	1	1	100,00	1	1	100
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	1	1	100,00	1	1	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor (skala Menengah dan Besar) yang Beraudensi Ke PEMDA	Investor	-	-	2	1	50,00	2	2	100
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kalidgn 2 Strategi	-	-	2	2	100,00	3	3	100
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	2	2	100,00	2	2	100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	3	1	33,33	3	3	100
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	-	-	85	96,02	112,96	87	87	100
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal	Dokumen	-	-	7.315	11.098	151,72	7.315	7.315	100

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	-	-	6.400	8.673	135,52	6.400	6.400	100
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	-	-	60	310	516,67	60	60	100
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	-	-	850	587	69,06	850	850	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	-	-	20	220	1.100,00	20	20	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN and PMA	Rupiah	-	-	16.204.808.228.295,70	16.054.131.303.892,70	99,07	17.355.990.095.316,40	17.355.990.095.316	100
		Jumlah Investor PMDN dan PMA	Pelaku Usaha	-	-	373	456	122,25	423	423	100
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan Perproyek yang Dipantau, Dibina dan Diawasi	Perusahaan	-	-	50	61	122,00	50	50	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	-	360	404	112,22	360	360	100

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	-	-	25	60	240,00	25	25	100
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Digital/ Elektronik)	Digital	-	-	1	1	100,00	1	1	100
					Jumlah Jenis Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Buku/Manual)	Buku	-	-	100	100	100,00	100	100	100
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	-	-	1	1	100,00	6.510	6.510	100
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	-	-	2	2	100,00	6.510	6.510	100
IV. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.														
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,7	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	29	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	502	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	52	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	500	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	-	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap ora n	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Ora ng	26	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pak et	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok ume n	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ora ng	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ora ng	400	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ora ng	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan administrasi umum perangkat daerah	Bul an	24	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pak et	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pak et	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pak et	72	-	-	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	-	-	-	-	-	-	-
8	1	,06	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1440	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	184	-	-	-	-	-	-	-
8	1	,06	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	34	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	-	-	-	-	-	-	-
8	1	,07	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	-	-	-	-	-	-	-
8	1	,07	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	120	-	-	-	-	-	-	-
8	1	,08	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	-	-	-	-	-	-	-
8	1	,08	0	0											

2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	172	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	8	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penanaman Modal	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang diberikan	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan peta potensi investasi	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA	Investor	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	Laporan	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan	Persen	177	-	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penebitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Izin	22.297	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	8	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	17450	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	700	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	40	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang tertib dan akuntabel dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya/ persentase pelaku usaha yang tertib dan akuntabel dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya	Pelaku Usaha	1050	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Pelaku Usaha	100	-	-	-	-	-	-	-

2	1	0	2	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	14	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	402	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	26	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan OSS yang terintegrasi ke DPMPSTP	Perangkat Daerah	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	-

Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi dan tercapai targetnya, hal ini disebabkan Kebijakan Nasional terkait Keuangan Negara dan Investasi, kondisi ekonomi Global dan Inflasi RI, Regional Kalimantan Barat yang kurang baik (masa *Covid-19* dan Perang Ukraina dan Rusia) yang menyebabkan gairah Investasi mengalami kontraksi, serta mengakibatkan alokasi Pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya terbatas dan dilakukan Refocusing Anggaran tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang selesai dan sampai ke pemohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	-	-	Rp 16.204.80 8.228.296	Rp. 17.355.99 0.095.316	Rp. 17.977.239.4 13.636,70	Rp. 19.137.64 8.003.322	Rp 16.054.13 1.303.893	Rp. 17.355.99 0.095.316	Rp. 17.977.239 .413.636,7 0	Rp. 19.137.64 8.003.322	-
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)	-	-	373	423	-	-	456	423	-	-	-
	- PMDN	-	-	350	400	-	-	412	400	-	-	-
	- PMA	-	-	23	23	-	-	44	23	-	-	-
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	-	-	15%	15%	14%	14%	13,53%	15%	14%	14%	-

5	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Nilai Sakip SKPD	-	-	A (80,86)	A (80,87)	A (80,70)	A (80,70)	BB (78,20)	A (80,87)	A (80,70)	A (80,70)	-	
7	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Menpan)	-	-	B (3,8)	A- (4,01)			A- (4,09)	A- (4,01)			-	
8	Nilai Kinerja PTSP (Kementerian Investasi/BKPM)	-	-	SB (80)	SB (82)	SB (82)	SB (82)	B (74,136)	SB (82)	SB (82)	SB (82)	-	
9	Nilai Kerja Pelayanan Publik (ORI)	-	-	Hijau (91)	Hijau (92)	Hijau (92)	Hijau (92)	Hijau (89,29)	Hijau (92)	Hijau (92)	Hijau (92)	-	
10	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	-	-	85%	87%	88%	89%	96,02%	87%	88%	89%	-	
				<u>Outcome</u>									
11	-	-		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-	-	13%	13%	-	-	13%	13%	-
				<u>Output</u>									
12	-	-		PERDA mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	-	-	1	-	-	-	1	-
13	-	-		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	-	1	-	-	-	1	-	-

14	-	-	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	-	1	1	-	-	1	1	-
15	-	-	Kegiatan seminar bisnis, Forum, <i>one on one meeting</i>	-	-	1	1	-	-	1	1	-
16	-	-	Kegiatan pameran penanaman modal	-	-	1	1	-	-	1	1	-
17	-	-	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	-	1	1	-	-	1	1	-
18	-	-	Konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	-	-	400	300	-	-	400	300	-
19	-	-	Penebitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	-	-	11.132	11.165	-	-	11.132	11.165	-
20	-	-	Laporan realisasi penanaman modal	-	-	1.160.408.589.685	1.160.408.589.685	-	-	1.160.408.589.685	1.160.408.589.685	-
21	-	-	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/ kota	-	-	10	10	-	-	10	10	-
23	-	-	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	-	-	50	50	-	-	50	50	-
24	-	-	Tersedianya data dan informasi perizinan dan nonperizinan kabupaten/ kota	-	-	15	15	-	-	15	15	-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja penanaman modal adalah Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA), Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA), Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN, Ratio penyerapan tenaga kerja dan untuk mengukur kecepatan dan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan di tambah dengan indikator Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan.

Realisasi investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) adalah tambahan jumlah realisasi investasi/penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang masuk di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM) yang telah disetujui oleh Kementerian Investasi/BKPM. Secara umum realisasi investasi di Kubu Raya selalu mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan realisasi investasi disebabkan salah satunya adalah terjadinya *Corona virus Disease (COVID*

19) yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di 221 Negara di Dunia selain situasi ini juga di pengaruhi adanya perang antar Negara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi ekonomi Global. Perekonomian Dunia di tahun 2023 juga sangat dipengaruhi oleh resesi ekonomi global sebagaimana tertuang dalam Laporan Bank Dunia yang berjudul “*Is a Global Recession Imminent*” Dimana beberapa indikasi yang sudah terjadi seperti kenaikan harga energi, kenaikan suku Bunga acuan secara agresif yang dilakukan Bank Central berbagai Negara dalam Upaya meredam Laju Inflasi. Di tahun 2023 Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah secara fokus dan intens menjaga stabilitas inflasi dengan berbagai regulasi dan kebijakan sehingga hal ini memberikan nilai positif bagi kepastian berinvestasi di Indonesia termasuk di daerah. Dilihat dari tabel diatas realisasi investasi di Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan dari tahun 2022 atau mengalami kenaikan 12,68% walaupun masih dibawah target yaitu sebesar 15%.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) adalah akumulasi jumlah pelaku usaha yang menanamkan modal di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan yang melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Laporan Kegiatan Penanaman Modal BKPM RI. Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) yang menyampaikan LKPM di Kabupaten Kubu Raya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk meningkatkan Daya saing dan Iklim Penanaman Modal/Investasi di Kabupaten Kubu Raya, telah dilakukan beberapa Upaya yaitu :

1. Kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP);
3. Melaksanakan pelayanan perizinan kejar bola langsung ke lokasi usaha, desa dan kecamatan termasuk di pusat-pusat perdagangan termasuk Mall
4. Meningkatkan kemampuan/kompetensi petugas pelayanan baik di Tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta mitra kerja DPMPSTSP seperti *Non Government Organization (NGO)*, Asosiasi usaha dan Perangkat Daerah teknis.

Peningkatan pelayanan perizinan dapat dilihat dari persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan adalah perbandingan antara

permohonan perizinan yang masuk dengan penyelesaian permohonan perizinan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis bagi pelayanan perangkat daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Penyediaan data dan informasi potensi penanaman modal di Kabupaten Kubu Raya;
2. Peningkatan Realisasi Investasi;
3. Optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk kemudahan, kenyamanan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Masyarakat yang PRIMA;
4. Peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
Indikator	Satuan	Indikator	Satuan													
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	8			Urusan Penanaman Modal					8.549.445.407,00						8.304.445.407,00
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabu Raya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,67	6.586.643.257	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabu Raya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80,67	6.586.643.257
2	1	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	74.005.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	74.005.600
2	1	0	2,01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.270.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.270.400

2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000
2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000
2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000
2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum en	1	6.680.000
2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	5	20.335.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	5	20.335.200

2	1	0	2,	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	1	6.680.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	3	6.680.000
2	1	0	2,		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokum en	250	4.331.194. 659	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokum en	251	4.331.194.6 59
2	1	0	2,	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	26	4.290.784. 397	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	26	4.290.784.3 97
2	1	0	2,	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokum en	250	26.480.092	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokum en	250	26.480.092
2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1	11.490.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1	11.490.800

2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Lapora n	1	2.439.370	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Lapora n	1	2.439.370
2	1	0	2,		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	26	186.330.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	26	186.330.600
2	1	0	2,	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	37.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	37.500.000
2	1	0	2,	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokum en	1	12.042.120	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokum en	1	12.042.120
2	1	0	2,	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	30.000.000
2	1	0	2,	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	30.288.480	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	30.288.480

2	1	0	2,	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	76.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	76.500.000
2	1	0	2,		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Penyediaan Layanan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	100	533.060.940	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Penyediaan Layanan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	533.060.940
2	1	0	2,	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	17.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	17.000.000
2	1	0	2,	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000
2	1	0	2,	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	266.217.920	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	266.217.920
2	1	0	2,	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	88.352.020	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	88.352.020

2	1	0	2,	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokum en	720	7.416.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokum en	720	7.416.000
2	1	0	2,	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	92	144.075.00 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	92	144.075.000
2	1	0	2,		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	20	358.000.00 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	14	358.000.000
2	1	0	2,	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	75.000.000
2	1	0	2,	00	Pengadaan Mebel	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	10.000.000	Pengadaan Mebel	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	10.000.000
2	1	0	2,	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	158.000.00 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	158.000.000

2	1	0	2,	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	115.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	115.000.000
2	1	0	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapora n	60	941.741.112	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapora n	60	941.741.112
2	1	0	2,	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	48	654.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	48	654.000.000
2	1	0	2,	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	287.741.112	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	287.741.112
2	1	0	2,		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	86	162.310.346	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	86	162.310.346
2	1	0	2,	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.552.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.552.600

2	1	0	2,	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	41.477.746	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	41.477.746
2	1	0	2,	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	57.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	57.050.000
2	1	0	2,	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.000.000
2	1	0	2,	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4.230.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4.230.000
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Ray a	Persentase pelaku usaha yang tertib dan akuntabel dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya	Persen	55	527.956.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Ray a	Persentase pelaku usaha yang tertib dan akuntabel dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya	Persen	1	527.956.000

2	1	0	2,		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Pelaku Usaha	50	527.956.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Pelaku Usaha	1	527.956.000
2	1	0	2,	00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kegiatan Usaha.	7	85.500.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kegiatan Usaha.	1	85.500.000
2	1	0	2,	00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	200	252.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	1	252.000.000

2	1	0	2,	00	Pengawasan Penanaman Modal	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	13	190.456.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	1	190.456.000
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Raya	Persentase Peningkatan Penanaman Modal	Persen	8,015	386.998.300	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Ka b. Ku bu Raya	Persentase Peningkatan Penanaman Modal	Persen	1	386.998.300
2	1	0	2,		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah laporan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang diberikan	Laporan	1	86.998.300	Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah laporan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang diberikan	Laporan		86.998.300
2	1	0	2,	00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	27.988.300	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	27.988.300

2	1	0	2,	00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokum en	1	10.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokum en	1	10.000.000
2	1	0	2,	00	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokum en	1	49.010.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokum en	1	49.010.000
2	1	0	2,		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah dokumen kebijakan dan peta potensi investasi	Dokum en	2	300.000.00 0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah dokumen kebijakan dan peta potensi investasi	Dokum en	1	300.000.000
2	1	0	2,	00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokum en	1	100.000.00 0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokum en	1	100.000.000
2	1	0	2,	00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokum en	1	200.000.00 0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokum en	1	200.000.000

2	1	0			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA	Investor	1	294.028.950	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA	Investor	89	294.028.950
2	1	0	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	Laporan	1	294.028.950	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	Laporan	11.165	294.028.950
2	1	0	2,01	00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	252.564.050	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	4	252.564.050
2	1	0	2,01	00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	41.464.900	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Ka b. Ku bu Raya	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	8.750	41.464.900
2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Raya	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan	Persen	88,00	606.027.900	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Ka b. Ku bu Raya	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan	Persen	300	606.027.900

2	1	0	2,		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah penebitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Izin	11. 132	606.027.90 0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah penebitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Izin	20	606.027.900
2	1	0	2,	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokum en	4	36.779.900	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokum en	550	36.779.900
2	1	0	2,	00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	8.7 00	460.100.00 0			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		460.100.000
2	1	0	2,	00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	400	29.913.100	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	50	29.913.100

2	1	0	2,	00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiata n Usaha	20	79.234.900	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiata n Usaha	7	79.234.900
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pelaku Usaha yang mendaftar perizinan melalui OSS	Pelaku Usaha	8.0 00	147.791.00 0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Pelaku Usaha yang mendaftar perizinan melalui OSS	Pelaku Usaha	201	147.791.000
2	1	0	2,		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS	Dokum en	1	147.791.00 0	Pengawasan Penanaman Modal	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS	Dokum en	13	147.791.000
2	1	0	2,	00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokum en	1	147.791.00 0	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokum en	1	147.791.000
2	1	6	2,		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada	Ka b. Ku bu Ray	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis	Dokum en	1	147.791.00 0,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada	Ka b. Ku bu Ray	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis	Dokum en	1	147.791.000 ,00

					Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a	OSS				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a	OSS			
2	1	6	2,	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokum en	1	147.791.00 0,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Ka b. Ku bu Ray a	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokum en	1	147.791.000 ,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Promosi investasi merupakan bagian penting dari roadmap strategi investasi BKPM. Untuk tujuan tersebut, perlu melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Fokus dalam jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.
2. Penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik, sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Membangun landasan untuk industrialisasi. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi. Tuntutan selanjutnya adalah penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan SPIPISE atau NSWi (National Single Window for Investment) secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini. Ketentuan hukum tentang insentif fiskal dan non-fiskal juga perlu diperhatikan untuk menunjang upaya industrialisasi skala besar ini.
4. Mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan untuk periode 2025–2026, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
2. Meningkatnya Investasi.

Adapun sasaran dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. Meningkatnya Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 2025
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	Meningkatnya tata Kelola Pemerintah yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (80,67)
				Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelayanan Berusaha (BKPM RI)	Nilai	SB (82)
				Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Ombudsman RI)	Nilai	Hijau (92)
2.	Meningkatnya Investasi	Jumlah akumulasi nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah akumulasi nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	Rupiah	17.977.239.413.636,70
				Jumlah nilai realisasi investasi tahunan	Rupiah	1.160.408.589.684,87
				Akumulasi jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)	Investor (NIB)	21.181 (21.145 PMDN dan 36 PMA)
				Jumlah tambahan investor berskala nasional (PMDN dan PMA) tahunan	Investor (NIB)	3200 (3200 PMDN dan 0 PMA)
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Tahun / Perusahaan	100
				Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	13%
				Meningkatnya Realisasi Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	Persen	88%

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PENANAMAN MODAL					6.784.112.333				8.708.601.267
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Kab. Kubu Raya	80,67	5.709.264.526	DAU	-	80,70	6.865.643.257
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Kubu Raya	13	33.000.080,00	DAU	-	12	91.005.600

2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Kubu Raya	3	11.127.120,00	DAU	-	2	29.270.400
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	3.087.600,00	DAU	-	1	7.680.000
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	3.087.600,00	DAU	-	1	7.680.000
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	3.087.600,00	DAU	-	1	7.680.000
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	3.087.600,00	DAU	-	1	7.680.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	Kab. Kubu Raya	5	6.434.960,00	DAU	-	5	23.335.200

		Kinerja SKPD								
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab. Kubu Raya	1	3.087.600,00	DAU	-	1	7.680.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Kubu Raya	250	4.374.011.880	DAU	-	250	4.631.194.659
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kab. Kubu Raya	26	4.341.599.708,00	DAU	-	26	4.590.784.397
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kab. Kubu Raya	250	24.480.092,00	DAU	-	250	26.480.092
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kab. Kubu Raya	1	6.550.560,00	DAU	-	1	11.490.800

2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kab. Kubu Raya	1	1.381.520,00	DAU	-	1	2.439.370
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	Kab. Kubu Raya	26	18.986.560	DAU	-	26	186.330.600
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	5.240.000,00	DAU	-	1	12.042.120
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kab. Kubu Raya	200	13.746.560,00	DAU	-	200	30.288.480
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	Kab. Kubu Raya	100	296.008.326	DAU	-	100	533.060.940
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Kubu Raya	1	20.000.000,00	DAU	-	1	10.000.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Kubu Raya	36	114.953.182,00	DAU	-	36	266.217.920

2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Kubu Raya	12	34.982.144,00	DAU	-	12	88.352.020
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Kubu Raya	720	2.160.000,00	DAU	-	720	7.416.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Kubu Raya	92	123.913.000,00	DAU	-	92	144.075.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	Kab. Kubu Raya	1	10.455.217	DAU	-	14	188.000.000
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab. Kubu Raya	1	10.455.217,00	DAU	-	10	128.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kab. Kubu Raya	60	867.807.527	DAU	-	60	1.073.741.112
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Kubu Raya	48	581.959.456,00	DAU	-	48	786.000.000

2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Kubu Raya	12	285.848.071,00	DAU	-	12	287.741.112
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	Kab. Kubu Raya	53	108.994.936	DAU	-	86	162.310.346
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Kab. Kubu Raya	1	32.195.184,00	DAU	-	1	37.552.600
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab. Kubu Raya	10	21.416.152,00	DAU	-	10	41.477.746
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab. Kubu Raya	25	17.850.000,00	DAU	-	70	57.050.000
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Kubu Raya	1	20.000.000	DAU	-	1	22.000.000

2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Kubu Raya	16	17.533.600,00	DAU	-	4	4.230.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penanaman Modal	Persen	Kab. Kubu Raya	8,015	50.766.800	DAU	-	8,015	174.453.620
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang diberikan	Laporan	Kab. Kubu Raya	1	40.766.800	DAU		1	86.998.300
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	6.826.800,00	DAU	-	1	27988300
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	20.000.000,00	DAU	-	1	10.000.000
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	13.940.000	DAU	-	1	49.010.000

2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan peta potensi investasi	Dokumen	Kab. Kubu Raya	2	10.000.000	DAU	-	1	87.455.320
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	10.000.000,00	DAU	-	1	0
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Calon Investor yang Beraudensi Ke PEMDA	Investor	Kab. Kubu Raya	1	58.055.200	DAU	-	1	294.028.950
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	Laporan	Kab. Kubu Raya	1	58.055.200	DAU	-	1	294.028.950
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	50.000.000,00	DAU	-	1	252.564.050
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	8.055.200,00	DAU	-	1	41.464.900
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan	Persen	Kab. Kubu Raya	88,00	511.995.268	DAU	-	91	698.728.440

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penebitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Izin	Kab. Kubu Raya	11.132	511.995.268	DAU	-	11.165	698.728.440
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Kab. Kubu Raya	4	10.000.000,00	DAU	-	4	36.779.900
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Kab. Kubu Raya	8.700	471.497.760,00			8.750	522.639.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	Kab. Kubu Raya	400	13.336.720,00	DAU	-	300	36.559.540

2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	Kab. Kubu Raya	20	17.160.788,00	DAU	-	20	102.750.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang tertib dan akuntabel dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya	Persen	Kab. Kubu Raya	55	395.741.574	DAU	-	56	527.956.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	Pelaku Usaha	Kab. Kubu Raya	50	395.741.574,00	DAU & DAK	-	50	527.956.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	Kab. Kubu Raya	7	38.953.400,00	DAU & DAK	-	7	85.500.000

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	Kab. Kubu Raya	200	247.879.966,00	DAU & DAK	-	200	252.000.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	Kab. Kubu Raya	13	108.908.208,00	DAU & DAK	-	13	190.456.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang mendaftarkan perizinan melalui OSS	Pelaku Usaha	Kab. Kubu Raya	8.000	58.288.965	DAU & DAK	-	8.500	147.791.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	58.288.965	DAU & DAK	-	1	147.791.000

2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	Kab. Kubu Raya	1	58.288.965,00	DAU	-	1	147.791.000
-------------------	--	--	---------	----------------	---	---------------	-----	---	---	-------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2025

Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah. Pagu Indikatif merupakan dasar alokasi awal dalam rangka penyusunan Rancangan APBD oleh Pemerintah Kabupaten. Pengalokasian sumber daya keuangan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah perlu diproyeksikan dengan tepat, untuk ditandingkan dengan rencana penerimaan daerah sehingga potensi celah fiskal yang mungkin terjadi dapat ditutup melalui jumlah pembiayaan yang tepat. Pagu indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

Pagu Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3
	URUSAN PENANAMAN MODAL	6.784.112.333,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.709.264.526,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.080,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.127.120,00
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.087.600,00
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.087.600,00
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.087.600,00
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.087.600,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.434.960,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.087.600,00

2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.374.011.880,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.341.599.708,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.480.092,00
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.550.560,00
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.381.520,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.986.560,00
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.240.000,00
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.746.560,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.008.326,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.953.182,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.982.144,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.913.000,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.455.217,00
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.455.217,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.807.527,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	581.959.456,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.848.071,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.994.936,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.195.184,00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.416.152,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00

2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.533.600,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	50.766.800,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.766.800,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.826.800,00
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	13.940.000,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10.000.000,00
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	58.055.200,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.055.200,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	8.055.200,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	511.995.268,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	511.995.268,00
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.000.000,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	471.497.760,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	13.336.720,00

2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	17.160.788,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	395.741.574,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	395.741.574,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	38.953.400,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	247.879.966,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	108.908.208,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	58.288.965,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.288.965,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	58.288.965,00

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Penanaman Modal dan Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu.

Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2026. Terkait dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada :

1. Seluruh Aparatur DPMPTSP berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Antara Rencana Strategis dengan rencana Kerja harus konsisten dan inovatif sehingga tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dapat berjalan dengan baik guna mencapai tujuan dan sasaran.
3. Rencana kerja Tahun 2025 ini merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

Sungai Raya, Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya



Maria Agustina, SE, M.Si

NIP. 19710816 199603 2 002